

**MODEL PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (*LIFE SKILLS*) BERBASIS
MASYARAKAT PEDESAAN SEBAGAI USAHA PENGENTASAN
KEMISKINAN DI WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA¹⁾**

Oleh:

Husaini Usman, Darmono, dan Bada Haryadi²⁾

Abstrak

Kwalitas hasil lembaga pendidikan formal khususnya yang ada di wilayah pedesaan terpencil, berbagai indikator menunjukkan mutunya belum dapat meningkat secara signifikan. Berangkat dari masalah tersebut muncul keluhan bahwa lulusan lembaga pendidikan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan kerja yang baik. Melihat kenyataan di lapangan tersebut, maka penelitian ini menawarkan suatu model PKH bagi APKSM agar dapat hidup mandiri sesuai dengan bekal keterampilan yang diikutinya.

Lokasi penelitian sebagai tempat uji coba model yang ditawarkan yaitu Desa Ngentakrejo dan Tuksono yang keduanya merupakan wilayah Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian ini pada tahun pertama (2006) menggunakan pendekatan penelitian survei yang didukung dengan metode pengumpulan data melalui penyebaran angket, *interview*, dan observasi lapangan. Sedangkan penelitian tahun kedua (2007), menggunakan pendekatan penelitian tindakan (*action research*) dan evaluasi yang didukung dengan metode pengumpulan data melalui eksperimen di lapangan, demonstrasi/pemberian tugas, observasi, dan *interview*. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) empat komponen model PKH yang dikembangkan dalam penelitian ini (komponen pengorganisasian, pendanaan, program aksi model PKH, serta evaluasi dan tindak lanjut) telah dijalankan oleh masyarakat yang dimotori Tim Kader Penggerak dan Pelaksana Program PKH, (2) komponen pengorganisasian model program PKH yang ditawarkan secara umum dapat berjalan dengan baik, (3) pengembangan pendanaan untuk menunjang program PKH di kedua desa pada umumnya telah dapat berjalan, dan (4) efektivitas pengembangan partisipasi PKH untuk kemandirian para APSKM yang dilakukan oleh masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif menggambarkan hasil yang sangat positif. Hasil penelitian ini baru merupakan titik awal untuk usaha pemberdayaan masyarakat khususnya para APSKM di pedesaan. Oleh karena itu, masih perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan peningkatan keterampilan (*skills*) dengan cara mengembangkan jenis usaha yang relevan dengan program pelatihan PKH yang telah diikuti.

Kata kunci: PKH, masyarakat pedesaan, dan pengentasan kemiskinan.

¹⁾ Penelitian dibiayai melalui Dana Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2007 Rp 45.000.000,00

²⁾ Dosen Jurusan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

A. PENDAHULUAN

Kualitas hasil pendidikan khususnya yang ada di wilayah pedesaan terpencil, berbagai indikator menunjukkan mutunya belum dapat meningkat secara signifikan. Berangkat dari masalah tersebut muncul keluhan bahwa lulusan lembaga pendidikan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan kerja yang baik. Dampaknya muncul gejala lulusan SLTP dan SLTA menjadi masalah di pedesaan, karena sulit mendapatkan pekerjaan, sementara mau membantu orang tuanya bekerja sebagai petani atau pedagang di pasar tradisional merasa malu. Hasil studi Blazely dkk. (1999), menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah cenderung sangat teoritik dan tidak terkait dengan lingkungan dimana anak didik berada. Akibatnya, peserta didik tidak mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah guna memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari itu semua, banyak pengangguran bahkan banyak anak putus sekolah akibat tidak mempunyai orang tua membiayai pendidikan anaknya.

Berdasarkan data penerimaan bantuan beras miskin (raskin) di desa Ngentakrejo terdapat sebanyak 940 KK miskin dan di Tuksono sebanyak 1.907 KK yang berhak menerima raskin. Sedangkan berdasarkan data bantuan melalui Sumbangan Langsung Tunai (SLT) di Ngentakrejo terdapat sebanyak 487 KK miskin dan di Tuksono ada sebanyak 599 KK miskin. Berdasarkan data hasil survei awal dan kemiskinan serta adanya dampak gempa bumi pada 27 Mei 2006 diprediksi di kedua desa tersebut terdapat banyak anak putus sekolah dari keluarga miskin (APSKM) tingkat SD, SLTP, maupun SLTA. Secara umum mereka menganggur dikarenakan belum memiliki pekerjaan yang tetap.

Melihat kenyataan di lapangan tersebut, maka penelitian ini menawarkan suatu model PKH bagi APSKM agar dapat hidup mandiri sesuai dengan bekal keterampilan yang diikutinya.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Anak Bekerja dan Bersekolah

Pada saat ini ada kesadaran yang tinggi dari para anak dan orang tua untuk menuntut pendidikan yang lebih tinggi. Namun pada akhir-akhir ini

dimana sekolah membutuhkan biaya yang tinggi ada kecenderungan anak untuk mencari pekerjaan. Penelitian Rubino Rubiyanto (1999) mengungkap, kecenderungan anak mencari pekerjaan mempunyai alasan, misalnya: (a) Pertimbangan ekonomi, adalah kondisi keluarga yang ekonominya lemah dan tidak mungkin untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Disamping hal tersebut, anak segera dilibatkan untuk bekerja membantu menjaga tegaknya periuk keluarga. (b) Alasan psikologis, dimana anak dianggap telah mencapai perkembangan yang cukup, mereka ingin mempunyai sumber nafkah sendiri, ingin merdeka serta menentukan hidupnya sendiri. (c) Alasan sosiologis, ialah berkaitan dengan watak sosial. Rolff dalam Monks (1999: 296) menjelaskan watak sosial adalah tingkah laku seseorang yang terikat oleh lingkungannya. Artinya sekolah dirasa memberikan pelajaran yang berbau kelas menengah, sehingga anak-anak dari kelas sosial yang rendah tidak terdorong untuk melanjutkan sekolah.

2. Sebab-sebab *Drop-Out*

Karim dan Saleh Sugiyanto (1990) dari penelitiannya menemukan sebab-sebab *drop-out* adalah: (1) orang tua tidak mampu membayar keperluan sekolah anaknya, (2) orang tua memerlukan tenaga mereka untuk bekerja di ladang / sawah atau menjaga adik-adiknya di rumah, (3) orang tua merasa rugi jika anaknya meneruskan sekolah karena mereka telah memiliki penghasilan, (4) sekolah kurang memberikan motivasi belajar yang baik kepada anak, perhatian sekolah kurang terhadap anak sehingga sering terjadi hubungan tidak baik bahkan permusuhan di antara anak sekolah, (5) pengaruh kelompok teman yang tidak sekolah sehingga menyebabkan mereka meninggalkan bangku sekolah.

Rubino Rubiyanto, dkk. (2002) dalam hasil penelitiannya di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta menemukan sebab-sebab anak putus sekolah sebagai berikut: (1) orang tua tidak mendorong anaknya untuk belajar, (2) tidak ada kesadaran orang tua, (3) orang tua beranggapan tidak ada gunanya mengeluarkan biaya sampai tamat SD, (4) kekurangan sarana sekolah, (5) buku-buku dan alat pelajaran tidak lengkap, (6) keuangan keluarga tidak mencukupi, (7) anak tidak

memiliki gairah belajar, (8) anak menyatakan tidak mau untuk mengulang di kelas, (9) baik orang tua atau anak puas asal dapat membaca dan menulis, (10) berijazah yang lebih tinggi belum tentu memiliki nasib yang baik di masa depan, (11) kurikulum sekolah tidak menunjang kehidupan, (12) suasana sekolah tidak menyenangkan, (13) anak menyatakan benci terhadap salah satu mata pelajaran, (14) anak tidak cocok dengan salah satu/ beberapa orang guru, (15) anak kurang senang terhadap cara guru mengajar, (16) anak kurang mendapat perhatian dari guru, (17) anak melakukan tindak kriminal, (18) anak dinikahkan karena desakan orang tua, (19) adanya gangguan kesehatan jasmani dan rohani, (20) lebih baik bekerja meringankan beban orang tua, (21) prestasi belajar rendah, (22) anak sulit memahami pelajaran, (23) pengaruh teman pergaulan, (24) tidak ada teman belajar, (25) anak tidak dapat menyesuaikan dengan peraturan sekolah.

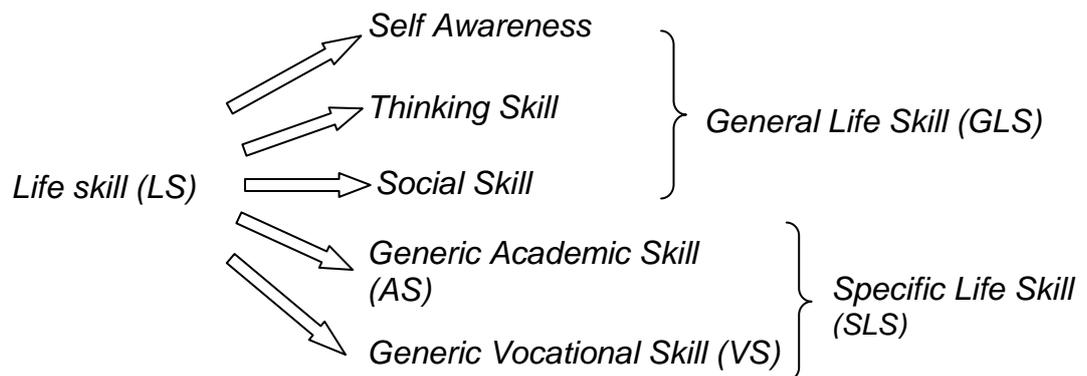
3. Konsep Dasar Pendidikan Kecakapan Hidup

Kecakapan hidup (*life skill*) lebih luas dari keterampilan untuk bekerja, apalagi sekedar keterampilan manual. Orang yang tidak bekerja, misalnya ibu rumah tangga atau orang yang sudah pensiun pun tetap memerlukan kecakapan hidup karena akan tetap menghadapi berbagai masalah yang harus dipecahkan. Orang yang sedang menempuh pendidikan juga memerlukan kecakapan hidup, karena mereka memiliki permasalahan yang harus dipecahkan. Bukankah dalam hidup, dimanapun dan kapanpun, orang selalu menemui masalah yang harus dipecahkan?

Kecakapan hidup (*life skill*) menurut Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (2002:2) adalah kemampuan yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling berinteraksi yang diyakini sebagai unsur paling penting untuk hidup lebih mandiri. Kemudian yang dimaksud pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) adalah upaya pembelajaran untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap, kemampuan vokasional bagi warga belajar untuk mampu bekerja atau usaha mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Kecakapan hidup terdiri dari lima macam, yaitu: (1) Kecakapan mengenal diri sendiri (*self awareness*) yang sering juga disebut kemampuan pribadi (*personal skill*), (2) Kecakapan

berpikir rasional (*thinking skill*), (3) Kecakapan sosial (*social skill*), (5) Kecakapan akademik (*academic skill*), dan (6) Kecakapan vokasional (*vocational skill*).

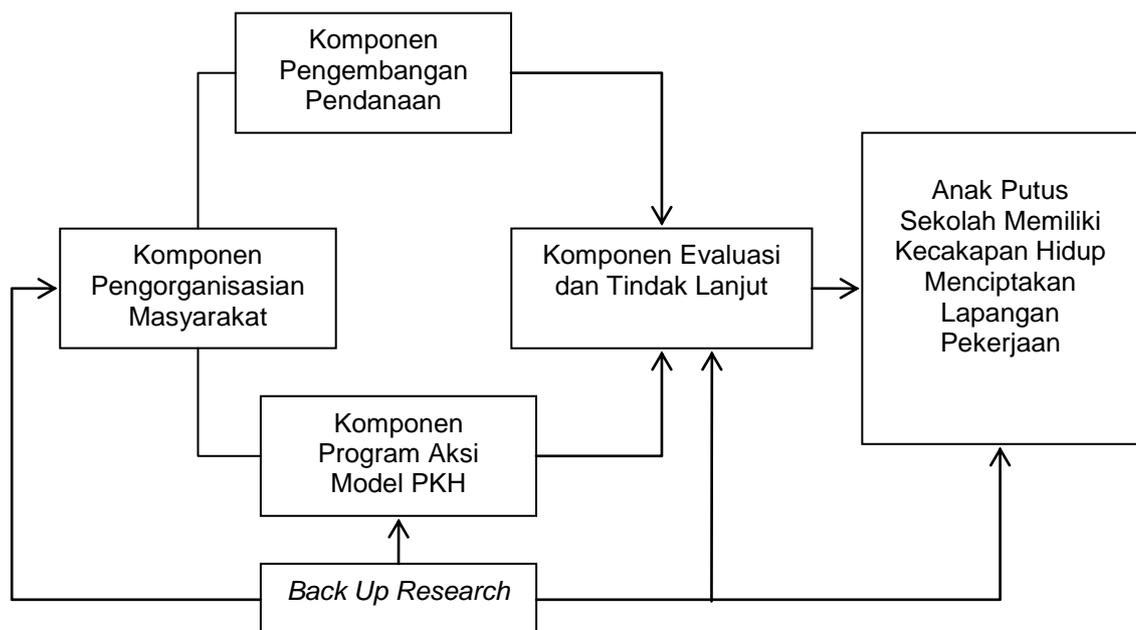
Berdasar keterangan tersebut PKH jika didiagramkan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Macam-macam Kecakapan Hidup

5. Deskripsi Model Program PKH

Desain model program PKH bagi APKSM yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah mengacu pada keempat komponen PKH, yang secara skematis dapat dilukiskan sebagai berikut.



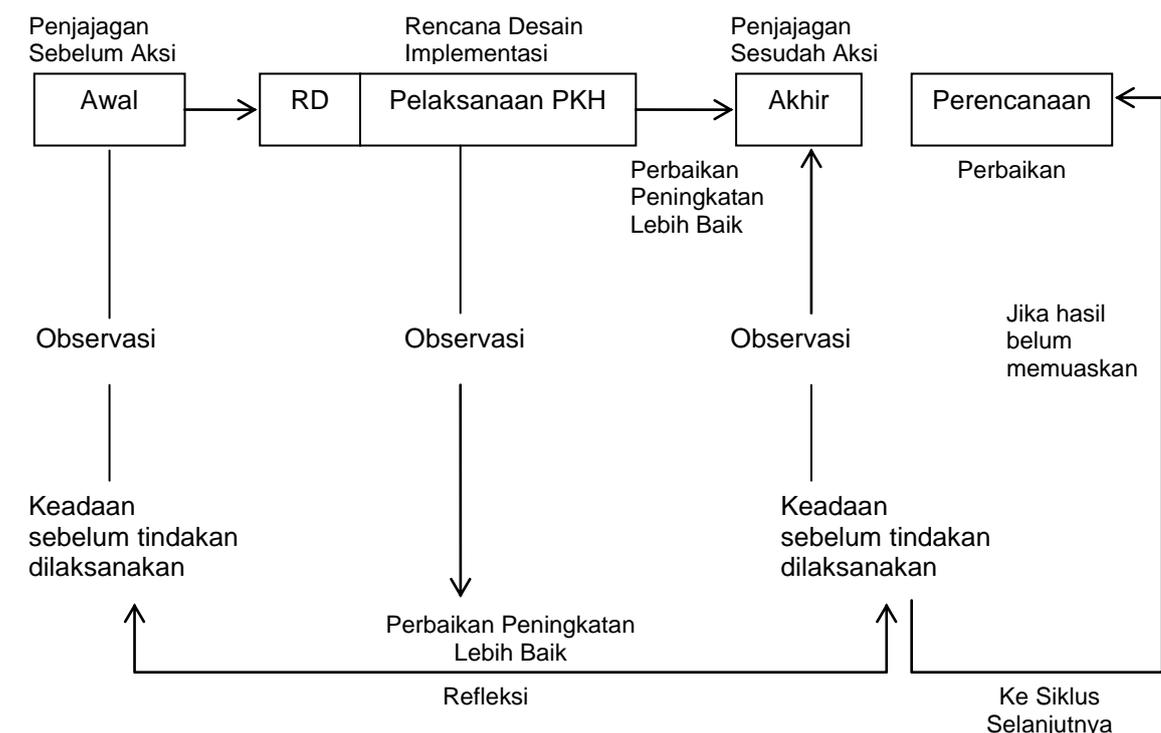
Gambar 2. Model Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)

C. METODE PENELITIAN

1. Langkah Penelitian

Langkah penelitian pada tahun kedua (2007) dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Penyusunan instrumen penelitian penelitian, (2) forum konsultasi dan koordinasi kegiatan tim peneliti dan pemerintah desa, (3) perintisan dan pembentukan serta pelatihan tim kader penggerak pendidikan kecakapan hidup (PKH) berbasis masyarakat dan tim pelaksana model PKH di dua desa ujicoba model, (4) pelaksanaan program aksi PKH bagi APSKM, (5) pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program PKH, pencatatan dan pelaporan, serta tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan.

Penekatan penelitian model program PKH bagi APKSM digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Pendekatan Penelitian

2. Metode Pengumpulan Data dan Pengembangan Model

Penelitian ini pada tahun pertama (2006) menggunakan pendekatan penelitian survei yang didukung dengan metode pengumpulan data melalui penyebaran angket, *interview*, dan observasi lapangan. Penelitian tahun

kedua (2007), menggunakan pendekatan penelitian tindakan (*action research*) dan evaluasi yang didukung dengan metode pengumpulan data melalui eksperimen di lapangan, demonstrasi/pemberian tugas, observasi, dan *interview*.

3. Teknik Analisis Data

Untuk mengukur sejauhmana efektivitas model PKH, indikator yang digunakan bertumpu pada empat komponen model PKH, yang meliputi: (1) pengorganisasian model, (2) pengembangan pendanaan, (3) program aksi, (4) Evaluasi dan tindak lanjut, serta (5) *back up research*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jumlah Peserta Program PKH

APSKM yang berhasil dilakukan pendataan pada tahun pertama (2006) untuk seluruh keluarga miskin di kedua desa yang memenuhi syarat untuk diberikan pelatihan program kecakapan hidup yaitu sebanyak 105 orang. Namun, setelah dilakukan penyebaran ulang instrumen untuk pemantapan jenis keterampilan yang diminati untuk diikuti sesuai dengan keinginan dan bakatnya dapat terkumpul sebanyak 115 orang. Penyebaran ulang instrumen ini dimaksudkan untuk melihat kebutuhan (*need assesment*) dari APSKM di kedua tersebut agar sesuai dengan jenis pelatihan keterampilan yang potensial untuk dilaksanakan. Dari jumlah tersebut, jenis keterampilan yang potensial dilaksanakan dan diminati oleh para APSKM pada saat pelatihan adalah seperti tertuang dalam Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah APSKM dan Jenis Keterampilan yang Dipilih dan Dilatihkan di Desa Ngentakrejo

No.	Jenis Keterampilan	Jumlah (Orang)
1.	Produksi Batako (PB)	12
2.	Pertukangan batu, besi, dan beton (PB3)	12
3.	Pertukangan kayu dan mebelair (PKM)	15
4.	<i>Finishing melamine</i> mebelair (FM2)	15
5.	<i>Service</i> sepeda motor (S2M)	20
Jumlah		74

Tabel 4. Jumlah APSKM dan Jenis Keterampilan yang Dipilih dan Dilatihkan di Desa Tuksono

No.	Jenis Pelatihan Keterampilan	Jumlah (Orang)
1.	Produksi Batako (PB)	8
2.	Pertukangan batu, besi, dan beton (PB3)	8
3.	Pertukangan kayu dan mebelair (PKM)	10
4.	<i>Finishing melamine</i> mebelair (FM2)	10
5.	<i>Service</i> sepeda motor (S2M)	5
Jumlah		41

2. Kebutuhan (*Need Assessment*) APSKM yang Berhasil Diidentifikasi

Hasil survei pada tahun I (2006), dari 105 orang responden APSKM yang berhasil diidentifikasi di kedua desa yang digunakan untuk ujicoba model penelitian, terdapat 11 jenis keterampilan yang diminati, yaitu: (1) bengkel (*service*) sepeda motor 23 orang (21,905%), (2) bercocok tanam/tani perkebunan 1 orang (0,952%), (3) beternak ayam/kambing sebanyak 1 orang (0,952%), (4) menjahit 6 orang (5,714%), (5) pertukangan kayu/batu 11 orang (10,476%), (6) produksi batako/bata semen 22 orang (20,952%), (7) *service* elektronika 1 orang (0,952%), (8) *service*/pelatihan komputer 2 orang (1,905%), (9) ukir kayu 1 orang (0,952%), (10) produksi bakpia 19 orang (18,095%), dan (11) diversifikasi produk tahu sebanyak 18 orang (17,143%).

Namun, setelah rencana tindakan akan dilaksanakan khususnya untuk pelaksanaan penelitian tahun kedua (2007) terjadi perubahan jumlah peserta, hasil survei pada tahun pertama (2006) terdapat 105 orang menjadi 115 orang pada tahun kedua (2007) sehingga ada kenaikan jumlah peserta sebanyak 14,29%. Ditinjau dari jenis keterampilan yang dapat dilaksanakan terjadi penurunan, yang pada saat survei tahun pertama (2006) terdapat 11 jenis keterampilan menjadi hanya tujuh jenis keterampilan saja, yaitu: (1) produksi batako, (2) pertukangan batu, (3) pertukangan besi, (4) pertukangan *beton*, (5) *pertukangan kayu dan mebelair*, (6) *teknik finishing melamine*, dan (7) *service* sepeda motor.

3. Modul Pelatihan Program PKH

Untuk mengembangkan modul pelatihan PKH dilakukan kerjasama dengan para pelaku kewirausahaan dan praktisi pendidikan keterampilan yang memiliki pengalaman profesional sesuai dengan jenis modul yang dibutuhkan. Sampai dengan berakhirnya penelitian tahun pertama (2006) modul yang berhasil disusun adalah modul: (1) Jiwa dan kiat-kiat berwirausaha, (2) Modul Menjahir, (3) Keterampilan Produksi Batako (Bata Semen), (4) Teknik Dasar Pertukangan Kayu, (5) Teknik *Finishing Melamine*, dan (6) Teknik Aplikasi Pertukangan Bangunan. Semua bentuk modul yang telah berhasil disusun selanjutnya dijilid dalam bentuk buku. Untuk lebih jelasnya contoh modul pelatihan PKH ini dapat dilihat pada lampiran laporan akhir penelitian ini.

4. Pendidikan Instruktur dan Tim Penggerak PKH di Pedesaan

Tingkat pendidikan instruktur dan tim kader penggerak yang menangani PKH bagi APSKM usia produktif di kedua desa uji coba model sangat bervariasi. Mereka ada yang tamat SLTP, SLA, dan D3, bahkan S1. Di desa Ngentakrejo, mayoritas instruktur dan tim kader penggerak adalah lulusan SLTP yaitu sebanyak 6 orang (40,00%), SLA sebanyak 5 orang (13,33%), D3 sebanyak 1 orang (6,67%), dan lulusan S1 sebanyak 2 orang (13,33%). Sedangkan untuk desa Tuksono instruktur dan tim kader penggerak program PKH yang paling banyak yaitu lulusan SLTA yaitu sebanyak 6 orang (60,00%), dan SLTP sebanyak 3 orang (30,00%), lulus D3 sebanyak 1 orang (10,00%), dan sarjana (S1) sebanyak 1 orang (10,00%).

5. Kegiatan Implementasi Program PKH

Tindak lanjut dari kegiatan penelitian tahun pertama (2006), para instruktur terlatih harus menerapkan hasil pelatihan untuk wilayah desanya masing-masing. Implementasi di lapangan merupakan upaya nyata dari para instruktur untuk mengembangkan program PKH bagi APKSM sesuai dengan kondisi, situasi, kebutuhan, kemampuan, dan minat dari para APSKM yang terjaring dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dengan instruktur sebanyak 25 orang di kedua desa dan dibantu atau didampingi oleh Kaur Kesra desa setempat, para instruktur tersebut pada penelitian tahun kedua (2007) telah dapat melaksanakan program PKH bagi APSKM sesuai dengan pilihan keterampilan di desanya masing-masing. Selama implementasi lapangan tahap pertama, telah berhasil dirumuskan suatu kesepakatan oleh para instruktur beberapa kegiatan yang menjadi prioritas program PKH di pedesaan. skala prioritas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

B. Pembahasan

1. Pemantapan Komponen Pengorganisasian Model PKH

Hasil evaluasi melalui angket yang disebarakan, menunjukkan bahwa di kedua desa untuk uji coba model program PKH, kondisi perjalanan pengorganisasian PKH yang memberikan penilaian dalam kategori sangat baik sebesar 20,45 %, kondisi baik sebesar 65,91 %, dan kondisi belum baik sebesar 13,64 %. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa organisasi PKH bagi APKSM di kedua desa uji coba model sudah berjalan dengan baik.

Dilihat dari kedinamisan organisasi dan jumlah peserta pelatihan program PKH, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengorganisasian PKH yang dilakukan masyarakat cukup efektif. Hal itu nampak dari perkembangan tindakan dan jumlah peserta pelatihan yang pada tahun pertama (2006) yang baru saja pada tahap proses pembentukan, pada tahun kedua telah dapat melakukan pengisian dan melaksanakan program PKH secara operasional. Hal Ini menunjukkan bahwa komponen organisasi PKH dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Guna memberikan gambaran lebih jauh mengenai tingkat keberjalanan organisasi PKH di kedua desa uji coba model dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

a. Keterlibatan Masyarakat dalam Organisasi Model PKH

Jumlah personil yang dilibatkan oleh tim penggerak untuk menunjang pelaksanaan model PKH sangat menggembirakan. Kesiediaan masyarakat

luas untuk terlibat secara langsung sebagai pelaksana model PKH menunjukkan bahwa program PKH dapat diterima oleh masyarakat. Data yang dikumpulkan dari 140 responden di dua desa menunjukkan, masyarakat pada umumnya dapat menerima dan bersedia terlibat pada kegiatan program PKH di desanya masing-masing. Bila dilihat dari persentasenya, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) 94 orang (67,14%) menerima dan bersedia terlibat dalam pelaksanaan program PKH, (2) 26 orang (18,57%) tidak dapat menerima dan tidak bersedia dilibatkan dalam program PKH, (3) 20 orang (14,26%) tidak tahu program PKH bagai APKSM tersebut.

b. Manfaat Organisasi Pelaksanaan PKH

Instrumen angket tentang kemanfaatan organisasi PKH yang disebar kepada 140 responden di dua desa wilayah penelitian dengan dibantu metode pengumpulan data melalui *interview*, menunjukkan bahwa: (1) 112 orang (80,0%) memberikan jawaban bahwa adanya manfaat tim kader/organisasi selaku pelaksana program PKH di pedesaan, (2) hanya 17 orang (12,14%) menjawab bahwa tim kader/organisasi pelaksana program PKH tidak dapat memberikan manfaat kepada para APSKM di pedesaan, (3) sedangkan 11 orang (7,86%) memberikan jawaban bahwa mereka tidak tahu adanya tim kader/organisasi PKH di pedesaan .

c. Efektivitas Organisasi Pelaksana PKH di Pedesaan

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui 140 responden yang bertempat tinggal di dua desa wilayah penelitian (Desa Ngentakrejo dan Tuksono), guna mengetahui sejauhmana efektivitas organisasi pelaksana PKH di pedesaan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) 106 responden (75,71) memberikan penilaian bahwa efektivitas organisasi PKH di pedesaan sangat baik, (2) 18 responden (12,86%) memberikan penilaian baik, dan (3) 16 orang (11,43%) memberikan kurang efektif adanya organisasi PKH di pedesaan guna mengatasi masalah APKSM dalam usaha hidup mandiri.

2. Komponen Pengembangan Pendanaan Program PKH

Komponen kedua dari model PKH yang diujicobakan ini adalah pengembangan pendanaan untuk program PKH. Yang dimaksud pengembangan di sini adalah cara dan sistem yang diterapkan oleh tim pelaksana program atau masyarakat dalam penggalan dana yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan PKH di desanya masing-masing. Komponen ini dianggap penting karena tanpa tersedianya dana, mustahil program PKH yang diintervensikan kepada masyarakat khususnya para APKSM ini dapat berjalan.

Pada penelitian tahun kedua (2007), telah dilakukan berbagai penyuluhan mengenai penggalan sumber dana untuk kelancaran program PKK ini. Mereka dilatih melakukan penggalan dan pengelolaan dana secara terbuka dan membiasakan diri untuk memanfaatkan jasa perbankan yang ada di desa terdekat, misalnya BRI, Bank Kredit Kecamatan (BKK), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan sebagainya. Pola ini dimaksudkan sekaligus sebagai upaya pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat.

Untuk mendukung gagasan tersebut, tim peneliti telah memberikan dana stimulan kepada masing-masing organisasi PKH di desa wilayah penelitian. Dengan stimulan tersebut, tim kader penggerak PKH desa diharapkan dapat menggali dana kepada masyarakat untuk selanjutnya dimasukkan ke bank yang telah ditentukan, sehingga dapat menambah dana stimulan yang telah ada.

3. Komponen Program Aksi Model PKH di Pedesaan

Sebagaimana telah dilaporkan pada hasil penelitian tahun kedua (2007), untuk memandirikan para APSKM, mereka perlu diberikan pelatihan keterampilan PKH khususnya kerja kewirausahaan sesuai dengan bakat dan minatnya. Setelah program PKH tersebut berjalan selama penelitian tahun pertama dan kedua maka perkembangannya dapat dilaporkan sebagai hal-hal sebagai berikut.

Para peserta program telah memiliki pengetahuan dan keterampilan kecakapan hidup meliputi: (1) produksi batako, (2) pertukangan batu, besi,

dan beton, (3) pertukangan kayu dan mebelair, (4) Teknik *finishing mebelair*, (5) *service* sepeda motor. Berbagi program keterampilan ini telah mulai berkembang di wilayah penelitian terutama terkait dengan masalah pertukangan sebab di kedua desa uji coba model mempunyai sumberdaya alam yang mendukung seperti pasir dan kayu. Begitu juga ditinjau dari kebutuhan tenaga kerja tukang di kedua desa tersebut sangat membutuhkan tukang karena pada saat pelaksanaan program PKH berlangsung sedang dilakukan rekonstruksi secara besar-besaran di wilayah desa tersebut.

4. Komponen Evaluasi dan Tindak Lanjut Program PKH

Pola evaluasi program kegiatan PKH bagi APKSM yang dikembangkan oleh masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Pertemuan berkala setiap satu setengah bulan sekali di tingkat desa dalam bentuk Forum Komunikasi dan Konsultasi Kegiatan PKH. Forum ini diikuti oleh para pengurus, tim kader PKH tingkat desa, dan dihadiri perangkat desa.
- b. Pertemuan rutin/bulanan di tingkat desa yang dihadiri oleh pengurus PKH maupun anggota kelompok.
- c. Pertemuan rutin ini pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain misalnya arisan anggota kelompok. Forum ini juga sekaligus digunakan sebagai wahana pembinaan dan monitoring program PKH desa.

Berdasarkan pengamatan dan hasil evaluasi tahun kedua (2007), diketahui bahwa mekanisme pertemuan sudah cukup baik, hanya saja di tingkat desa peran pemerintah (dalam hal ini petugas Kaur Kesra) masih cukup tinggi, artinya ketergantungan terhadap Kaur Kesra masih tinggi. Sedangkan di tingkat dusun kelemahan terletak pada fungsionaris dusun, mereka sebagian menganggap bahwa dengan masuknya program PKH hanya akan menambah beban tugas bagi perangkat dusun. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme evaluasi dan tindak lanjut yang merupakan komponen keempat dari model PKH telah berjalan dengan baik. Namun demikian, bukan berarti tidak ada hambatan pada saat

pelaksanaan di lapangan. Berbagai masalah tersebut itu antara lain, keterbatasan dana, transpot peserta pertemuan, kesadaran perangkat desa maupun anggota kelompok pengurus dan tim kader penggerak PKH dan lain-lain. Untuk mengatasi hal tersebut, maka selama ujicoba model semua biaya pertemuan ditanggung tim peneliti, sedangkan setelah selesai program diharapkan mendapat bantuan dari anggota kelompok PKH yang ada di desanya masing-masing.

Mengenai tindak lanjut hasil evaluasi, pada umumnya ditangani oleh tim PKH di tingkat desa. Misalnya, PKH di desa Ngentakrejo, berdasarkan forum evaluasi, jenis KUP yang semula dibatasi hanya bidang finishing mebelair, karena dinilai kurang produktif, maka kemudian dikembangkan ke jenis usaha yang lain seperti pertukangan kayu, pertukangan bangunan, produksi batako, dan sebagainya. Demikian juga dalam hal anggota kelompok, semula hanya terbatas APSKM, kemudian diperluas kepada siapa saja yang berminat asal sanggup mematuhi aturan kelompok dalam bidang kewirausahaan ini.

Setelah pengembangan Model PKH berjalan dua tahun pertama dan kedua, maka tim peneliti mencoba menelusuri seberapa besar dampak dari program PKH terhadap pemerintah daerah setempat maupun kepada masyarakat pada umumnya. Penelusuran ini didasarkan atas hasil pengamatan dan penyebaran angket secara luas. Evaluasi dampak program secara luas dilakukan pada akhir ujicoba model, yaitu penelitian tahap kedua tahun 2007.

Adapun hasil pengamatan sampai penelitian tahun kedua (2007) dampak program PKH dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Dari segi keterlibatan Dinas/Instansi terkait di wilayah uji coba pengembangan model, ternyata relatif cukup luas, yakni sejak dari perangkat desa sampai kecamatan telah terlibat secara langsung dalam proses pengembangan model PKH, antara lain nampak dalam setiap kegiatan pelatihan, bahkan sampai akhir terbentuknya tim penggerak dan pelaksana PKH tingkat desa. Ini menunjukkan bahwa dampak program PKH cukup positif.

- 2) Dari segi kebijakan baru sehubungan dengan masuknya program PKH di kedua wilayah desa ujicoba model, ternyata juga nampak di desawilayah Ngentakrejo sebagai tempat sentra industri kerajinan perkayuan tumbuh dengan baik.
- 3) Dari segi pembinaan lanjutan terhadap program yang telah dirintis oleh pihak tim peneliti, peran pemda tampaknya juga cukup tinggi. Di desa Ngentakrejo, peserta KUP mendapatkan perhatian cukup positif dari Pemda Kabupaten Kulon Progo antara lain melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan bantuan sarana misalnya peralatan *finishing melamine* berupa kompresor kepada KUP (industri kecil perkayuan dan mebel) sebagai bentuk pembinaan tindak lanjut dari kegiatan pelatihan PKH yang diselenggarakan oleh tim peneliti.

5. Dampak Program PKH

a. Dampak terhadap Masyarakat

Dengan hadirnya program PKH masyarakat di kedua wilayah DESA uji coba khususnya para tokoh masyarakat hampir seluruhnya telah terlibat dalam berbagai kegiatan PKH. Sampai saat ini masing-masing desa setidaknya terdapat 10 - 20 orang tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung dengan berbagai program PKH. Peran mereka, diantaranya adalah sebagai kader penggerak program PKH dan pengurus PKH di tingkat desa.

Dari data lapangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dampak program PKH yang dikembangkan di dua wilayah (desa Ngentakrejo dan Tuksono) terhadap masyarakat cukup positif. Dampak yang baik perlu dipertahankan sehingga menjadi modal utama dalam pengembangan lebih lanjut untuk tindak lanjut pengembangan program PKH.

Hasil penyebaran angket yang mengungkap pengetahuan yang diberikan kepada 60 tokoh masyarakat di dua desa yang diambil secara random, dapat dilaporkan sebagai berikut: (1) skor tinggi 45 - 48 dicapai 15 orang (25%), (2) skor sedang 40 - 44 dicapai 27 orang (45%), dan (3) Skor rendah 35 - 39 dicapai 18 orang (30%)

Selanjutnya kepada responden yang sama diungkapkan mengenai minat mereka terhadap program PKH, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) minat rendah (skor 35 - 39) sebanyak 8 orang (13,33%), (2) minat sedang (skor 40 - 44) sebanyak 24 orang (40%), (3) minat tinggi (skor 45 - 48) sebanyak 28 orang (46,67%). Dengan demikian dampak program PKH terhadap masyarakat khususnya dari segi pengetahuan dan minat mereka terhadap kegiatan PKH cukup tinggi.

b. Dampak terhadap APSKM di Wilayah Penelitian

Jumlah APSKM yang berhasil mendapatkan layanan PKH berbasis masyarakat secara program berjalan dapat dilaporkan sebagai berikut: (1) Desa Ngentakrejo 74 orang, dan (2) Desa Tuksono 41 orang

Dari angka-angka tersebut menunjukkan bahwa program PKH dapat membantu mengatasi masalah masyarakat khususnya dalam rangka memperluas layanan membekali keterampilan (memandirikan) para APSKM yang belum berdaya di pedesaan.

c. Dampak terhadap Keluarga APSKM

Sebanyak 115 kepala keluarga yang anaknya putus sekolah dan mengikuti program PKH secara random dilakukan wawancara mengenai persepsi dan tanggapannya terhadap kegiatan program PKH yang melibatkan anggota keluarganya.

Hasilnya diketahui bahwa tidak seorangpun orang tua dari orang tua APSKM tersebut yang merasa tidak senang dengan adanya program PKH ini. Sebagai contoh salah satu orang tua memiliki keluarga putus sekolah yang semula menganggur tidak memiliki keterampilan, setelah mereka dididik melalui program PKH ini, saat sekarang anak tersebut dapat produktif bisa mandiri dengan keterampilan produksi batako. Orang tua tersebut merasa sangat berbahagia karena anaknya sekarang dapat bekerja sehingga tidak selalu menggantungkan dirinya lagi pada orang lain. Demikianlah contoh kasus tanggapan orangtua/keluarga atas hadirnya program PKH di pedesaan wilayah ujicoba model penelitian, yang secara umum dapat disimpulkan

bahwa dampak program PKH di pedesaan terhadap keluarga APSKM adalah sangat positif.

E. KESIMPUNAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) empat komponen model PKH yang dikembangkan dalam penelitian ini telah dijalankan oleh masyarakat, (2) tingkat keberjalanan komponen pengorganisasian model program PKH ditawarkan secara umum dapat berjalan dengan baik, (3) pengembangan pendanaan untuk menunjang program PKH di kedua desa wilayah penelitian pada umumnya telah berjalan sesuai dengan kreativitas dan kesadaran masing-masing pengurus dan Tim Kader Penggerak Program PKH, (3) efektivitas pengembangan partisipasi pendidikan keterampilan kerja untuk kemandirian bagi APSKM telah dilakukan oleh masyarakat, (4) dampak program PKH terhadap pemerintah setempat, masyarakat, dan para APSKM sangat positif, dan (5) model program PKH dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu alternatif penanganan pengangguran di Indonesia. Model ini dalam beberapa hal mampu mendorong masyarakat lebih mandiri dalam mengatasi persoalan sosial pada masyarakat di pedesaan.

2. Saran-saran

Beberapa saran berdasar hasil kegiatan penelitian: (1) Karena pelatihan keterampilan bagi APSKM di tahun kedua melibatkan banyak pihak, maka peran dan pemantapan para tim kader penggerak di tingkat desa sangat diharapkan, (2) Hasil penelitian ini merupakan titik awal untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya APSKM., (2) Peran dan dukungan dari instansi terkait (pemerintah desa, kecamatan, Dinas Pendidikan melalui Subdin PLS, TLD, PKBM, Balai Latihan Kerja, serta organisasi pemerintah dan sosial desa) sangat diharapkan agar target kegiatan penelitian secara keseluruhan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan bagi semua pihak, (3) Model program PKH perlu direplikasikan

ke tempat lain yang lebih luas atas dukungan pihak pemerintah daerah setempat tentunya dengan penyesuaian yang dipandang perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- Coombs, PH. (1973). *New Part to Learning for Rural Children and Youth: Non Formal Education for Rural Development*. New York: IECD.
- Darmono. (2003). *Back Stopping Keaksaraan Fungsional. Laporan Kegiatan*. Yogyakarta: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Depdiknas Dirjen Diklusepa. (2002). *Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten/Kota*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Diklusepa Proyek Pemberdayaan Tenaga Kependidikan Luar Sekolah dan Proyek Pendidikan Luar Sekolah.
- Ivan Illich. (1982). *Bebas dari Sekolah. Terjemahan oleh C. Woekirsari*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kerlinger, Fred N. (1986). *Foundation of Behavioral Research*. Third Edition Holt, Rinehart & Winston.
- Karim dan Saleh Sugiyanto. (1976). *Menampung Anak Usia Sekolah: Antara Target dan Kemampuan*, "Prisma" No. 2 Th. V. Jakarta : LP3S.
- Kartini Kartono. (1990). *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Monks, Knoer dan St. R. Haditono. (1999). *Psikologi Perkembangan..* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muller, Johannes. (1980). *Pendidikan Sebagai Jalan Pembebasan dari Cengkeraman Kemelaratan*. Prisma No. 7 Th. IX. Jakarta. LP3S.
- Mubyarto. (1991). *Etos Kerja dan Kohesi Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Prajono, dkk. (2002). *Identifikasi Anak Putus Sekolah Keluarga Miskin di Kecamatan Tepus dan Tanjungsari Gunungkidul*. Laporan Program SIBERMAS Dikti. Jakarta: Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Richard Beckhard, (1987). *The Program for Specialis in Organization Training and Development Institute*. Insititute for Applied Behaviour Science.
- Thoby Mutis. (1995). *Kewirausahaan yang Berproses*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.